

**MANAJEMEN PELAKSANAAN PROGRAM USAHA EKONOMI
KELURAHAN SIMPAN PINJAM (UEK-SP) KELURAHAN MAHARATU
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU**

PUTRI MALASARI DAN ZAILI RUSLI

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax
(0761) 63277

Abstract: village empowerment program (PPD) as the Sub-Economic Business Savings and Loans (UEK-SP) which aims to reduce poverty and is expected to empower the community, and provide support for the creation of an environment conducive to realize the community's role in development, particularly in their own welfare. To achieve the goal of good management is needed in order to provide a conducive environment to realize the role of society in development. Economic Business Programs Village Savings and Loans (UEK-SP) Maharatu Sub Sub Marpoyan Peace Pekanbaru has good management just is not maximized it is derived from the presence of arrears of beneficiaries.

Keywords: planning, organizing, actuating, controlling and Economic Business Programs Village Savings and Loans (UEK-SP)

Keadaan perekonomian dewasa ini sangat memprihatinkan, yang kita ketahui khususnya di Indonesia kini terdapat berbagai permasalahan yang menyangkut mengenai kehidupan bermasyarakat, antara lain masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah lingkungan hidup dan lain-lain. Kemiskinan merupakan suatu masalah besar dimana kemiskinan sesungguhnya telah menjadi masalah dunia sejak berabad-abad lalu. Namun realitanya, hingga kini kemiskinan masih menjadi bagian dari persoalan terberat dan paling krusial di dunia ini. Provinsi Riau yang kaya dengan sumber daya alam juga tidak menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, tetap saja masalah kemiskinan tidak terlepas dari daerah. Fenomena kemiskinan yang bertolak belakang dengan kekayaan sumber daya alam Riau, mengindikasikan bahwa kemiskinan di Riau bukan disebabkan oleh kemiskinan alami, tetapi lebih disebabkan oleh kemiskinan struktural yang *multidimensional*. Kondisi ini berakibat pada ketidakmampuan masyarakat Riau dalam memperoleh hak yang paling mendasar dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Akar permasalahannya adalah kebijakan pembangunan yang belum fokus pada masyarakat miskin.

Lahirnya UU No.32 tahun 2004 tentang otonomi daerah membuat setiap daerah bisa mengatur otonominya masing-masing termasuk dalam hal penanggulangan kemiskinan, undang-undang tersebut yang mendukung lahirnya surat keputusan Gubernur Riau No. Kpts.132/BPPM/2005 tanggal 31 Maret 2005 mengeluarkan kebijakan program melalui program pemberdayaan desa atau kelurahan yang dituangkan secara tegas dalam pedoman umum dan petunjuk teknis.

Adapun tujuan dilaksanakannya program pemberdayaan desa provinsi Riau secara khusus adalah:

- a. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa atau kelurahan .
- b. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa atau kelurahan yang berpenghasilan rendah.
- c. Meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa atau kelurahan.
- d. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir.
- e. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan dana usaha desa atau kelurahan.
- f. Meningkatkan kebiasaan gotongroyong gemar menabung secara tertib.
- g. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa atau kelurahan.
- h. Memenuhi kebutuhan sasaran atau prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa atau kelurahan.

Sementara sasaran yang akan dicapai dalam program pemberdayaan desa kegiatan ini adalah:

- a. Berkembangnya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi perdesaan atau kelurahan yang sehat dan berdaya saing tinggi.
- b. Terpenuhnya kebutuhan dasar sarana dan prasarana penunjang ekonomi, pendidikan dan infrastruktur desa atau kelurahan melalui pembangunan yang tumbuh dari bawah (*bottom up*) yang di implementasikan oleh seluruh dinas instansi sektoral baik provinsi maupun kabupaten atau kota.
- c. Melembagakan sistem perencanaan partisipatif dilingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota melalui peran aktif dinas dan sektoral.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota sebagai pelaksana program pemberdayaan desa (PPD) dengan nama Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP). Program ini dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan dapat memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakannya secara terbuka (transparan) dan penuh tanggung jawab. Serta memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.

Adapun rekapitulasi alokasi besaran dana PPD dan sumber dana PPD di kota Pekanbaru tahun 2005-2011 jumlah UEK-SP yang sudah diberi bantuan sebanyak 33 kelurahan untuk melaksanakan program UEK-SP ini dari tahun 2005-2010, Pada tahun 2011 ada 5 kelurahan yang bertambah untuk mendapatkan dana dalam melakukan Program UEK-SP, dan rencananya ada penambahan kelurahan lagi untuk melakukan program ini. Awalnya kelurahan yang mendapatkan dana ini berdasarkan kelurahan yang memiliki persentasi penduduk miskin yaitu jumlah penduduk di bagi dengan jumlah penduduk miskin. Salah satu kelurahan yang melaksanakan Program Pemberdayaan Kelurahan yang di kenal dengan Usaha Ekonomi Kelurahan-Simpan Pinjam (UEK-SP) ini adalah Kelurahan Maharatu. Kelurahan Maharatu mendapatkan dana tidak seperti kelurahan lainnya yang berdasarkan persentasi penduduk miskin melainkan berdasarkan instruksi dari Wali Kota Pekanbaru karena kelurahan Maharatu terpilih menjadi kelurahan yang terbaik di tahun 2008, tetapi dana di cairkan di awal tahun 2009 dan Program UEK-SP di laksanakan.

Namun hasilnya tidak sesuai dengan tujuannya hal ini terlihat masih banyaknya jumlah rumah tangga miskin di kota Pekanbaru. Adapun jumlah rumah tangga Miskin di Pekanbaru paling banyak terdapat pada kecamatan Tenayan Raya yaitu berjumlah 3033 rumah tangga, rumah tangga miskin yang tergolong sedang terdapat pada kecamatan marpoyan Damai yaitu berjumlah 2541 rumah tangga, dan rumah tangga miskin yang paling sedikit yaitu terdapat pada kecamatan Sail yaitu berjumlah 628 rumah tangga. Kelurahan Maharatu termasuk pada rumah tangga miskin yang tergolong sedang yang merupakan salah satu kelurahan yang mengalami peningkatan rumah tangga miskin pada tahun 2008. Hal ini bisa saja terjadi akibat pelaksanaan program pemberdayaan desa/kelurahan Maharatu yang tidak tepat sasaran karena indikator dari data diatas berdasarkan variabel dan kriteria kemiskinan.

Selain itu, fenomena yang ditemukan penulis dilapangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan kelurahan di kelurahan Maharatu adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program usaha ekonomi kelurahan (UEK-SP) Kkelurahan Maharatu dinilai kurang maksimal karena masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan programnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini, yang terdapat penunggakan pengembalian pinjaman.

Tabel 1.1 Data Pemanfaat UEK-SP yang menunggak di Kelurahan Maharatu dari Tahun 2009-2010

No	Tahun	Jumlah Tunggakan (Rp)	Persentase
1	2009	Rp 213.016.055	28,24 %
2	2010	Rp 541.170.754	71,76 %
Total		Rp 754.186.809	100 %

Sumber data : UEK-SP Maharatu

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Kelurahan maharatu sempat terpilih menjadi kelurahan yang berhasil menjalankan UEK-SP karena perguliran dari dana yang di kelola mengalami kemajuan pesat, memiliki jumlah tunggakan pengembalian yang cukup besar di tahun 2009 sebesar Rp 213.016.055 pada tahun 2010 naik sebesar Rp 541.170.754. tunggakan-tunggakan tersebut yang membuat perguliran dana di masyarakat terganggu.

2. Dalam pemberian dana pada masyarakat miskin, dari penelitian dilapangan, yang mendapat bantuan bukanlah masyarakat miskin. Juga terdapat adanya masyarakat yang berstatus ekonomi tergolong menengah mendapatkan dana bantuan dari program usaha ekonomi kelurahan .

Tabel 1.2 Status Sosial / Ekonomi Pemanfaatan Dana Usaha Desa dan Dana Simpan Pinjam PPD

Jumlah Penduduk	Jumlah RT. Miskin	Pemanfaatan UEK-SP	
		Sedang	Miskin (Penerima BLT)
27.382	607	258	54

Sumber data : UEK-SP Maharatu

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jumlah masyarakat miskin sebagai pemanfaat sangat sedikit. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat miskin dikelurahan Maharatu tidak mempunyai usaha yang menjadi ketentuan khusus dalam Program Pemberdayaan Desa atau kelurahan (PPD), sementara bantuan masyarakat miskin tanpa adanya anggunan di keluarkan kelurahan sebanyak 10%

dari alokasi dana yang diberikan namun ketentuan pinjaman hanya bisa meminjam maksimal Rp. 1.000.000,-.

Program UEK-SP ini juga memberikan dampak positif kepada masyarakat setempat untuk mengembangkan usahanya, tetapi ada juga usahanya yang kurang berkembang bahkan gagal bagi masyarakat atau pemanfaat yang menggunakan dana ini tidak secara produktif melainkan konsumtif. Penyimpangan-penyimpangan pastinya tidak akan terlepas naik turunnya jumlah rumah tangga miskin di beberapa kelurahan di kota Pekanbaru meskipun total keseluruhannya mengalami penurunan, dan adanya penunggakan dalam pengguliran dana di kelurahan Maharatu serta pemanfaat yang tidak menggunakan dana tersebut secara produktif.

Semua hal ini tentu saja berkaitan erat dengan Manajemen Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan UEK-SP di Kelurahan Maharatu ini yang mendapatkan alokasi dana APBD Kota Pekanbaru yang di jalankan dengan optimal atau tidak. Khususnya untuk rumah tangga miskin yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dan bisa menjadi pemanfaat UEK-SP juga. Bertitik tolak dari permasalahan diatas, maka Manajemen Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru belum optimal. Manajemen adalah seni untuk mengatur program yang sedang dijalankan oleh organisasi.

Menurut Henry Fayol dalam Schermerhom (1996: 34) manajemen adalah proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan atau pengendalian. Selanjutnya, G.R Terry dalam Brantas (2009: 7) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan manajemen adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan dari orang lain.

Selain itu fungsi manajemen menurut **George R Terry dalam Manulang (2001:8)** adalah sebagai berikut :

1. Fungsi *Planning* (perencanaan)

Fungsi *planning* atau perencanaan merupakan suatu kegiatan dimana didalam kegiatan itu terdapat proses pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan penuh keyakinan untuk mencapai hasil-hasil yang dikehendaki.

Menurut **M. Manulang (2001:44)** mengatakan rencana yang baik, haruslah mengandung sifat-sifat sebagai berikut :

- Pemakaian kata-kata yang sederhana dan terang
- Fleksibel
- Ada dalam perimbangan
- Meliputi semua tindakan yang diperlukan

Dapat disimpulkan bahwa, perencanaan adalah menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan menentukan orang-orang yang bertanggungjawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Fungsi *Organizing* (pengorganisasian)

Organizing atau pengorganisasian merupakan suatu kegiatan dalam menentukan, menggolongkan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap

untuk mencapai tujuan. Penugasan orang-orang dalam kegiatan ini dengan menerapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Menurut **Malinowski dalam Eti cahyati (2003:2)** mengatakan organisasi sebagai sekelompok orang yang bersatu dalam tugas-tugas, terikat pada lingkungan tertentu, menggunakan alat teknologi dan patuh pada peraturan. Adapun menurut **Ibnu Syamsi (1994:14)** dalam rangka membentuk suatu organisasi yang baik atau dalam usaha menyusun suatu organisasi perlu di pedomani beberapa asas atau prinsip organisasi, adapun beberapa prinsip organisasi yaitu:

- Pembagian tugas pekerjaan
- Pelimpahan wewenang dan tanggungjawab
- Adanya tingkat pengawasan
- Adanya prinsip kesatuan perintah dan tanggungjawab

Menurut **M. Manulang (2001:60)** mengatakan organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut :

- Organisasi dalam arti badan adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu.
- Organisasi dalam arti bagan atau struktur adalah gambaran secara skematis tentang hubungan-hubungan, kerjasama dari orang-orang yang terdapat dalam rangka mencapai suatu tujuan.

3. Fungsi *actuating* (penggerakan/ pengarahan)

Fungsi *actuating* (penggerakan/ pengarahan) merupakan usaha agar semua kelompok suka melaksanakan tercapainya tujuan dengan kesadaran dan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.

Menurut **Siswanto (2006:125)** menyatakan pengarahan dimaksudkan untuk menentukan bagi karyawan mengenai apa yang harus mereka kerjakan didalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya **Brantas (2009:95)** berpendapat penggerakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, mengarahkan , mengatur segala kegiatan yang di beri tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha.

Pengarahan sangat penting dilakukan agar kesalahan dan penyimpangan yang terjadi tidak berlangsung lama, segera dapat diatasi, agar tujuan tetap dapat dicapai. Karena itu pula fungsi pengarahan tidak bisa dipisahkan dari fungsi pokok manajen yang lainnya.

4. Fungsi *controlling* (pengawasan)

G.R Terry dalam Brantas (2009:188) mengatakan pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apa perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Sedangkan **M. Manulang (2002:173)** berpendapat pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengkoreksi dengan maksud pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

G.R Terry menyatakan bahwa yang dimaksud dengan manajemen adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan dari orang lain. Fungsi-fungsi

manajemen menurut G.R terry terdiri dari planning, organizing, actuating dan controlling (dalam Brantas: 2009, 7). G.R Terry membagi sumber-sumber manajemen (Tool Of Manajemen) ke dalam 6M, yaitu :

- a. Men, tenaga kerja manusia baik tenaga kerja eksekutif maupun operatif,
- b. Money, uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan,
- c. Methods, cara-cara yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan,
- d. Materials, bahan-bahan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan,
- e. Machines, mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan/dipergunakan untuk mencapai tujuan,
- f. Markets, pasar untuk menjual output dan jasa-jasa yang telah dihasilkan.

METODE

Penelitian ini tergolong dalam analisa deskriptif kualitatif yang menjelaskan masalah manajemen pelaksanaan UEK-SP di kelurahan Maharatu dan faktor yang mempengaruhi manajemen pelaksanaan UEK-SP di kelurahan Maharatu dengan lokasi penelitian di jalan Kartama No.72. Sementara informan penelitian adalah informan yang mengetahui dan memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian, dengan menggunakan *Snowball Sampling*. Adapun teknik pengumpulan Data menggunakan Interview, Observasi dan Studi kepustakaan

A. Manajemen Pelaksanaan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Manajemen Pelaksanaan program pemberdayaan desa (PPD) melalui usaha ekonomi kelurahan simpan-pinjam (UEK-SP) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang dilakukan dalam mengatasi masalah kemiskinan, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakannya secara terbuka (transparan) dan penuh tanggung jawab. Untuk melihat keberhasilan manajemen pelaksanaan program pemberdayaan kelurahan UEK-SP di kelurahan Maharatu kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Dengan ini maka penulis uraikan secara rinci mengenai Manajemen Pelaksanaannya dalam penelitian adalah :

a. *Perencanaan atau planning*

Perencanaan atau *planning* adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang dari apa-apa yang akan di kerjakan dalam rangka pencapaian yang telah di tentukan. Dimana berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil sebagai berikut :

“Perencanaan awal kami adalah untuk mewujudkan visi dan misi UEK-SP Maharatu Jaya ini, intinya untuk membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha dan mengentaskan kemiskinan dikelurahan ini, kami mau kelurahan ini maju dan dengan adanya UEK-SP ini masyarakat yang kekurangan ekonomi akan terbantu “ (Wawancara dengan Ketua UEK-SP Maharatu Jaya , Lyaniza Rizki, SE , 10 Oktober 2012, 10.20)

Hasil wawancara ini menjelaskan bahwa perencanaan awal dalam melaksanakan program UEK – SP sudah dapat dilakukan oleh pengelola program. Kemampuan pengelola program dalam melakukan perencanaan awal tidak terlepas dari kemampuan, pengetahuan dan keahlian pengelola program itu sendiri. Sebab perencanaan awal yang dilakukan dapat memberikan kontribusi

yang positif bagi pengelola dalam mewujudkan visi dan misi apabila dipandang secara internal dan mengenali kebutuhan usaha masyarakat yang akan dikembangkan apabila dipandang eksternal. Dalam upaya mencapai tujuan pelaksanaan program UEK-SP perencanaan awal sangat penting dilakukan. Pelaksanaan program rancangan selanjutnya merumuskan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk memaksimalkan perencanaan dan pencapaian tujuan, pengelola memberikan target bagi keberlangsungan usaha yang didanai program UEK-SP. Pada proses perencanaan pengelola menetapkan sasaran pengucuran dana dengan menilai pihak-pihak dan masyarakat dinilai layak diberikan dana. Agar program pemberdayaan masyarakat berjalan dengan optimal, maka kegiatan selanjutnya adalah penentuan target pengembalian dana dan keuntungan yang akan didapat dilaksanakan dengan hati-hati. Pada dasarnya bentuk perencanaan program UEK-SP telah dirumuskan dalam rancangan rencana jarak menengah (RJM) yang berisi tentang daftar prioritas pembangunan kelurahan selama lima tahun kedepan dan RTPD/K yang merupakan penjabaran dari RJM dengan berisi tentang skala prioritas untuk satu tahun anggaran. Selain itu perencanaan yang dilakukan dengan sub indikatornya sebagai berikut:

- Sederhana

Perencanaan dalam mengelola dana yang diberikan pada masyarakat dilaksanakan sesuai petunjuk teknis program pemberdayaan desa. Perencanaan pengelolaan dana dilakukan dengan melihat kondisi kelurahan seperti potensi dan karakteristik penduduk di kelurahan bersangkutan, tanpa mengabaikan petunjuk teknis yang telah diberikan, pengelola UEK-SP di kelurahan Maha ratu merencanakan program ini dengan baik sesuai dengan tujuan program pemberdayaan secara keseluruhan. Kesederhanaan perencanaan dapat dilihat dari pedoman teknis yang dimiliki. Pada jukis UEK-SP, pengelolaan dana pemberdayaan desa telah direncanakan dengan sederhana didalamnya berisi mengenai tatacara pemberian kredit, tugas dan tanggungjawab beserta pengawasan dan evaluasi.

- Fleksibel

Fleksibel dalam merencanakan pengelolaan merupakan kunci keberhasilan sebuah program, fleksibel bukan berarti tidak konsisten tetapi lebih mengarah kepada upaya cara pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan potensi yang dimiliki tanpa harus melenceng dari panduan teknis yang telah ditetapkan. Pengaturan sederhana dan fleksibel dapat meningkatkan kinerja program dan pengelola dana UEK-SP,

“Meminjam dana di UEK-SP ini tergolong mudah di bandingkan dengan lembaga kredit lainnya, dari segi pencairan dana juga sangat mudah n cepat. Dari segi pelayanannya pengelola tepat waktu jam 8 sudah buka”. **(wawancara pemanfaat UEK-SP Maharatu, Amsar 25 Desember 2012, 15.30)**

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses pemberian talangan direncanakan secara sederhana dan fleksibel hal tersebut dilihat dari kemudahan proses peminjaman.

- Ada dalam pertimbangan

Pengelolaan UEK-SP di kelurahan maharatu telah dilakukan dengan mengacu pada jukis yang ada seperti yang disebutkan pada wawancara berikut ini:

“Petunjuk teknis pengelolaan program pemberdayaan desa merupakan dasar tata kelola yang dimiliki organisasi, petunjuk ini dirumuskan bertujuan untuk mengatur program UEK-SP berjalan dengan efektif dan efisien” (Wawancara dengan Ketua UEK-SP Maharatu Jaya, Lyaniza Rizki, SE, 20 Desember 2012, 15.30)

Perencanaan pengelolaan dana UEK-SP yang bertumpu pada jukis sama halnya merencanakan program dengan pertimbangan yang matang. Petunjuk teknis dikeluarkan atas pantauan pengelola terhadap kondisi masyarakat dari sisi sosiologis maupun psikis, hanya saja dalam menyalurkan dana kepada masyarakat pertimbangan yang mendasar adalah penentuan besarnya dana berdasarkan kemampuan, karakter, kelayakan usaha yang dimiliki penerima manfaat dengan ketentuan dan persyaratan dalam pengajuan kredit.

- Mengikuti semua tindakan

Kegiatan mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku telah dilaksanakan oleh pengelola UEK-SP. Pada proses perencanaan kegiatan-kegiatan perencanaan seperti penentuan tujuan pada program UEK-SP di kelurahan Maharatu telah dilakukan secara maksimal dalam memberikan pelayanan kredit. Langkah-langkah perencanaan tersebut dilakukan untuk menempatkan sumber daya yang dimiliki kelurahan sesuai dengan keadaan desa guna mensukseskan program pemberdayaan desa.

“untuk memberikan dana pemberdayaan semua aturan yang terdapat dalam jukis pemberian kredit misalnya melakukan survei/verifikasi kepada pemanfaat, dengan memberikan pertanyaan untuk apa dana itu digunakan kemudian menyurvei rumah dan tempat usahanya untuk menilai kelayakan pemberian dana” (Wawancara dengan Ketua UEK-SP Maharatu Jaya, Lyaniza Rizki, SE, 20 Desember 2012, 14.00)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa penyaluran kredit dilakukan dengan perencanaan yang sesuai dengan prosedur selain mengadakan survei dan verifikasi pengelola memberikan arahan agar penerima manfaat paham dengan program pemberdayaan desa. Pada proses perencanaan pengelola melakukan tindakan penetapan tujuan program, penetapan sumber daya, perumusan strategi dan standar keberhasilan UEK-SP tertera dalam petunjuk teknis pengelolaan program UEK-SP.

b. Pengorganisasian atau *organizing*

Pengorganisasian atau *organizing* merupakan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga terciptanya suatu organisasi yang dapat di gerakkan dalam pencapaian tujuan. Pelaksanaan pengorganisasian meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pembagian kerja

“untuk pembagian kerja, kami membagi sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan semua pekerjaan kami laksanakan sesuai dengan job description yang telah ditetapkan” (Wawancara dengan Ketua UEK-SP Maharatu Jaya , Lyaniza Rizki, SE, 11 Desember 2012, 15.30)

Pembagian kerja merupakan kegiatan pembagian dan penjadwalan kerja pegawai untuk mencapai tujuan sebuah program. Fungsi pembagian kerja ini untuk memudahkan koordinasi, pengawasan dan menghindarkan bentrok kerja, pembagian kerja diwujudkan dalam pemberian tugas untuk masing masing bagian

dengan ketentuan kerja yang mengacu pada kondisi ril di lapangan. Pembagian pekerjaan akan disesuaikan dengan kemampuan seorang berdasarkan pendidikan dan pengalaman kerja. Kesesuaian latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki pengelola UEK-SP memungkinkan untuk memberikan kontribusi maksimal demi tercapainya tujuan organisasi.

- Adanya tingkat pengawasan

Pengawasan pada dasarnya bertujuan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan prosedur oleh pengelola dalam menjalankan tugas yakni menyalurkan dana pemberdayaan desa. Program UEK-SP memiliki beberapa tingkatan-tingkatan pengawasan program, tingkatan pengawasan tertinggi program pemberdayaan desa berada di tingkat pemerintah provinsi melalui badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan masyarakat.

“Tingkat pengawasan tertinggi dalam UEK-SP Maharatu berada dalam provinsi BPM bangdes, untuk tingkat kelurahan diawasi oleh pengawas umum”
(Wawancara dengan Ketua UEK-SP Maharatu Jaya , Lyaniza Rizki, SE, 21 Desember 2012, 15.30)

Dengan adanya hasil wawancara tersebut diatas dapat kita lihat bahwa terdapat tingkatan dalam pengawasan di UEK-SP Maharatu. Tingkatan pengawasan tertinggi di tingkat provinsi ditangani oleh BPM bangdes provinsi Riau yang bertanggungjawab mengawasi program pemberdayaan kelurahan di provinsi Riau. Sementara di tingkat kabupaten/kota yang bertindak sebagai badan pengawas inspektorat wilayah kabupaten/kota, pihak kecamatan melalui Kasi PMD selaku tenaga asistensi UEK-SP dan di kelurahan pengawasan dilakukan oleh pengawas umum.

- Adanya kesatuan perintah dan tanggung jawab

“perintah yang kami terima itu langsung dari ketua UEK-SP Maharatu, sementara untuk tanggung jawab dibebankan kepada masing-masing pengelola sesuai jobnya masing-masing. Tetapi jika ada kesalahan, maka kami akan memperbaiki kesalahannya dan tidak menutup kemungkinan kami dibantu dengan rekan-rekan yang lain.”
(Wawancara dengan tata usaha UEK-SP Maharatu jaya, Azma Qori Lenggogeni, 25 Desember 2012, 16.00)

Dari hasil wawancara tata usaha diatas, dapat dilihat bahwa adanya kesatuan perintah dari ketua. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat kerja sama antara masing-masing pengelola meski para pengelola mengetahui tugasnya masing-masing. Melalui satu pemegang perintah dan tanggungjawab oleh ketua diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam menjalankan tugas. Pemberian perintah oleh ketua harus mengacu pada target program seperti kebijakan-kebijakan terkait pengguliran dana UEK-SP yang tidak termuat dalam tugas dan wewenang masing-masing bagian.

c. Pengarahan atau *actuating*

Pengarahan atau *actuating* adalah usaha-usaha mengarahkan sumber daya agar bekerja sesuai dengan rencana program. Pelaksanaan pengarahan mempunyai kegiatan sebagai berikut :

- Mengkoordinir kegiatan bawahan.

Koordinasi yang baik dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dan tingkat kinerja organisasi, karena koordinasi merupakan penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan dari unit-unit yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Salah satu tugas ketua atau pimpinan adalah melakukan koordinasi

yang baik dengan bawahan serta mengkoordinir kelancaran kegiatan. Program yang memiliki tujuan kuat mengharuskan pemegang kebijakan untuk mampu mengkoordinir anggota agar program berjalan dengan baik. Berikut hasil wawancara tentang mengkoordinir kegiatan bawahan:

Upaya peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dilakukan ketua dengan memberikan arahan-arahan tugas disetiap harinya, pada akhir bulan pengelola selalu mengadakan evaluasi kerja dengan agenda melihat tingkat perkembangan program beserta kendala-kendala yang dihadapi. **(Wawancara dengan pendamping UEK-SP Maharatu Jaya, Taruma Yazid, 19 Desember 2012, 15.00)**

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa ketua telah mengkoordinir kegiatan bawahan. Peran ketua dalam mengkoordinir kegiatan bawahannya sangat penting seperti memberikan arahan-arahan dan motivasi agar pegawai menjalankan tugas dengan maksimal. Mengkoordinir kegiatan bawahan merupakan tugas ketua dalam menjalankan peran agar tujuan menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan individu.

- Menjalin hubungan baik antara pemimpin dengan bawahan.

Hubungan baik antara pimpinan dengan bawahan mutlak dilakukan agar program berjalan dengan baik, menjaga hubungan baik dengan bawahan tidak serta merta menghilangkan ketegasan sebagai seorang pemimpin. Menjalin hubungan baik bertujuan agar tidak adanya kesalahpahaman antara ketua dan jajarannya, berbagai cara dilakukan agar hubungan baik pimpinan terhadap bawahan

“dalam menjaga hubungan baik dengan bawaha saya selaku ketua UEK-SP memberikan perhatian terhadap bawahan dengan menjaga silaturahmi sesama pengelola seperti mengadakan syukuran dan acara lainnya serta membiasakan diri untuk bertegur sapa dimanapun kita berada”. **(Wawancara dengan Ketua UEK-SP Maharatu Jaya, Lyaniza Rizki, SE, 01 Desember 2012, 13.45)**

Berdasarkan hasil wawancara di atas upaya menjaga hubungan baik telah dilakukan oleh ketua UEK-SP di kelurahan Maharatu dengan mengadakan kegiatan-kegiatan informal yang dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dengan adanya perhatian-perhatian dari seorang pemimpin. Adanya hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawahan menyebabkan timbulnya komunikasi secara baik. Komunikasi yang baik mempermudah pimpinan dalam memberikan pemahaman mengenai tugas yang harus dijalankan dan hal-hal yang wajib dihindari.

- Memberikan pendidikan kepada bawahan itu sendiri.

Pendidikan kepada bawahan sangat penting untuk kemajuan program UEK-SP, memberikan pendidikan terhadap bawahan dilakukan oleh pengelola UEK-SP Maharatu Jaya berupa pendidikan khusus pada penyusunan laporan keuangan, hal ini dilakukan karena dalam menyusun laporan keuangan harus disusun dengan tepat dan akurat. Penyusunan laporan yang baik memudahkan pengelola untuk mengevaluasi program baik untuk mengidentifikasi masalah maupun untuk mencari solusi masalah, untuk itu dibutuhkan pengetahuan lebih dalam menyusun laporan keuangan. Selain itu pemberian pelatihan dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan kegiatan workshop tentang tugas-tugas pengelola yang diberikan oleh Pembina di tingkat Kecamatan. Sementara di tingkat kelurahan sendiri pemberian pendidikan dilakukan dengan memberikan

pelatihan melalui diskusi harian dan mingguan mengenai program beserta tanggungjawabnya.

- Merealisasikan tujuan

Pendidikan yang bagus memudahkan pengurus UEK-SP untuk merealisasikan tujuan sebuah program. Tujuan dalam sebuah organisasi merupakan hal terpenting, untuk itu para pelaku organisasi wajib memiliki tujuan dan merealisasikannya. Upaya pengelola program UEK-SP maharatu jaya dalam merealisasikan tujuan program diawali dengan merencanakan program seperti yang telah dibahas sebelumnya yakni merencanakan dalam jangka menengah (RJM) maupun rencana jangka pendek. Pada tahap pelaksanaan penyaluran dana UEK-SP pengelola memberikan persyaratan pinjaman dan melakukan kelayakan pemberian dana pemberdayaan, hal ini dilakukan agar berkurangnya tunggakan oleh pemanfaat.

- d. pengawasan atau *controlling*

Pengawasan atau *controlling* adalah proses penilaian dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program UEK-SP diawasi oleh badan BPM bangdes, BPP MKB, koordinator daerah dan untuk tingkat kelurahan adalah tokoh masyarakat yang terpilih melalui musyawarah. Pelaksanaan pengawasan mempunyai tujuan untuk :

- Menentukan standar-standar yang di gunakan sebagai dasar pengawasan.

Untuk mengawasi kegiatan yang sedang berjalan dibutuhkan standar-standar pengawasan. Penataan standar pengawasan bertujuan untuk memaksimalkan kinerja diberbagai lini, dengan adanya pengawasan yang ketat dan bijaksana diharapkan kinerja pengelola dapat ditingkatkan untuk mencapai tujuan program secara maksimal. Selain itu tujuan pengawasan adalah mengurangi kecurangan dan penyelewengan dana yang digulirkan untuk program pemberdayaan masyarakat. Penentuan standar pengawasan pada dasarnya telah mengacu pada petunjuk teknis pengelolaan dana pemberdayaan baik untuk pengawasan kinerja pengelola maupun proses pemberian dana pada penerima manfaat. Dalam kegiatan pengawasan ada beberapa prinsip pemantauan pengelolaan UEK-SP yaitu pemantauan harus dilihat sebagai alat penting untuk memperbaiki program, prinsip partisipasi dan transparansi dilaksanakan secara nyata, dan mengumpulkan informasi seakurat mungkin sehingga program berjalan seperti perumusan awal.

- Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai

Bentuk penilaian hasil UEK-SP di kelurahan maharatu menggunakan pengawasan atau pemantauan, kegiatan pengawasn dilakukan secara internal dan eksternal, dengan adanya pengawasan mempermudah pengelola program mengevaluasi kinerja masing-masing bagian, berikut hasil wawancara mengenai pengukuran hasil yang telah dicapai:

“untuk mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai, maka kami melakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program selama periode tertentu dengan evaluasi internal dan eksternal dari Provinsi ” (Wawancara dengan pendamping UEK-SP Maharatu Jaya, Taruma Yazid, 19 Desember 2012, 10.00)

Proses mengukur hasil pelaksanaan program telah dilakukan di UEK-SP Maharatu Jaya, adapun kegiatannya dilakuka setelah semua perencanaan

dilaksanakan, kegiatan menilai hasil pelaksanaan program atau evaluasi pelaksanaan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran dan kontribusi program dalam mencapai tujuan yang dicapai. Pelaksanaan evaluasi program UEK-SP di kelurahan Maharatu dilaksanakan dalam dua evaluasi yaitu evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Berdasarkan proses evaluasi didapat bahwa Program UEK-SP di kelurahan maharatu menunjukkan bahwa hasil program secara keseluruhan dalam keadaan baik namun masih terdapat banyak kekurangan misalnya dari sisi pengembalian dana masih terdapat tunggakan yang terjadi akibat oleh macetnya usaha dan perpindahan tempat domisili penduduk, walaupun demikian untuk pemberdayaan masyarakat tergolong cukup baik karena masyarakat terbantu oleh program UEK-SP untuk mengembangkan usahanya.

- Menentukan penyimpangan

Proses evaluasi program selain untuk melihat perkembangan program evaluasi digunakan sebagai penentuan penyimpangan yang dilakukan pengelola. Proses evaluasi program sangat diperlukan untuk melihat perkembangan dan kendala-kendala atau terjadinya penyimpangan yang terjadi. Adapun penyimpangan yang terjadi pada program pemberdayaan ini berupa penyalahan kode etik pengelola yakni penyimpangan prinsip dan prosedur. Penyimpangan yang seperti ini dinilai sangat sedikit hanya pada program UEK-SP di kelurahan Maharatu masih terdapat banyak kendala yaitu tunggakan-tunggakan pengembalian dana dari masyarakat, hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap proses penyaluran dana dan masih kurangnya penyuluhan terhadap penerima manfaat dari pihak pengelola mengenai pentingnya ketepatan pengembalian dana. Untuk itu masih diperlukan perbaikan pada pengawasan penyaluran dana program pemberdayaan masyarakat terutama pada proses verifikasi pemberian dana kepada pemanfaat.

- Melakukan tindakan perbaikan

Setiap program pada sebuah organisasi memiliki banyak masalah baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi, terlepas dari kesalahan-kesalahan yang menjadi masalah sebuah program maka langkah bijak yang wajib dilakukan adalah mengadakan perbaikan-perbaikan di setiap lini tanpa saling menyalahkan. Upaya perbaikan oleh pengelola UEK-SP kelurahan Maharatu adalah dengan melihat pedoman evaluasi kinerja dan pedoman pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat hal ini mengacu pada surat keputusan gubernur Riau NO KPTS.537/XII/2005 tentang pedoman teknis. Surat keputusan berisikan mengenai bagaimana program UEK-SP dilaksanakan dan langkah-langkah yang akan diambil ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEKSP) di Kelurahan Maharatu

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Didalam mengelola UEK-SP pengelola harus memiliki SDM pengelola yang baik agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan efektif, dan dapat mencapai tujuan UEK-SP yakni membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha. Untuk menilai pengetahuan pengelola dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan melihat tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan pengelola masih dalam kondisi yang cukup baik, hal ini terlihat rata-rata pengelola telah mendapat pendidikan lanjutan dan cukup banyak pengelola yang telah menamatkan tingkat

pendidikan di perguruan tinggi seperti DIII dan strata satu (S1).Tingkat pendidikan pengelola dapat mempengaruhi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan dana modal bagi penerima manfaat program UEK-SP. Selain tingkat pendidikan jumlah pengelola harus proporsional di setiap bagian, adapun tujuan pembagian secara proporsional adalah untuk meningkatkan produktivitas dan profesionalisme pengelola.

2. Lingkungan

Faktor kedua setelah sumber daya manusia yang dimiliki yakni lingkungan penunjang sukses sebuah program. Pemenuhan sumber daya manusia yang berkompeten tidak akan berjalan bila lingkungan organisasi tidak ikut menunjang keberhasilan program. Untuk melihat lingkungan program UEK-SP di kelurahan maharatu berikut hasil wawancara dengan responden;

“guna memberikan pelayanan kredit yang baik, pengelola sepakat bahwa setiap pemohon manfaat diberikan layanan terbaik, dari waktu pencairan misalnya kami memberikan jangka waktu paling lama 2 minggu kerja. Sementara warga sini memang sedikit susah untuk di atur apalagi ketika sedang waktunya pembayaran banyak sekali alasannya, padahal setahu saya usaha mereka cukup bagus. Ya saya sebagai penagih memberikan peringatan dan pemberitahuan agar segera melunasi utang, ini juga demi kebaikan mereka” (**Wawancara dengan Kasir UEK-SPMaharatu Jaya, Hamidah Pulungan, 09 Desember 2012, 18 Desember 2012, 13.30**)

Kedisiplinan menjadi perhatian penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencapai target dan tujuan program yang sedang dilaksanakan. Perilaku disiplin memang menjadi hal sangat penting, karena dengan berperilaku disiplin maka lingkungan akan menjadi yang baik segera direalisasikan. Lingkungan internal organisasi biasanya menjadi sorotan publik dalam melayani masyarakat, banyak cara yang dilakukan untuk menjadikan program menjadi sukses yang pertama adalah dengan mereformasi keadaan lingkungan dalam organisasi untuk bersikap disiplin. Melihat hasil wawancara di atas maka disimpulkan bahwa lingkungan kerja program UEK-SP di kelurahan maharatu tergolong cukup baik, terlihat dari kedisiplinan pemberian layanan yang sesuai dengan ketentuan.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki UEK-SP merupakan penunjang pengelola dalam memberikan layanan terhadap masyarakat. Adanya sarana dan prasarana yang baik sangat membantu peningkatan kinerja dan memudahkan pengelola dalam meberikan pelayanan yang maksimal. Berdasarkan observasi yang dilakukan diketahui bahwa program UEK-SP di kelurahan Maharatu telah memiliki prasarana yang baik diantaranya telah memiliki gedung dilengkapi dengan penerangan dan listrik yang memadai. Keadaan gedung cukup sederhana dengan memiliki ventilasi yang cukup untuk proses keluar masuk udara. Berikut hasil wawancara mengenai keadaan prasarana yang dimiliki pengelola dalam mengelola program UEK-SP:

“pada dasarnya gedung ini merupakan gedung yang dimiliki kelurahan, kami menempatnya sudah cukup lama dan kami merasa cukup nyaman walaupun memang tidak semewah gedung lain, hal ini disesuaikan dengan program yang sedang kami jalankan nanti kalo terlalu mewah bukan program untuk masyarakat

melainkan untuk ketua” (Wawancara dengan Ketua UEK-SP Maharatu Jaya, Lyaniza Rizki, SE, 13 Desember 2012, 14.30)

Berdasarkan wawancara di atas dilihat bahwa gedung yang dimiliki memberikan rasa nyaman terhadap pengelola maupun pengunjung. Selain itu dalam memberikan pelayanan pengelola UEK-SP Maharatu Jaya memiliki alat-alat pendukung kerja tersebut seperti meja, computer, alat-alat tulis, box penyimpanan dokumen merupakan alat. Alat pendukung kerja yang dimiliki pengelola program UEK-SP seperti perangkat-perangkat komputer yang masih berfungsi dengan baik, hal ini menandakan bahwa pengelola UEK-SP juga memperhatikan teknologi untuk menunjang kecepatan dan ketepatan dalam melayani pemberian dana talangan penambahan usaha, berdasarkan penjelasan tersebut disimpulkan bahwa prasarana yang dimiliki UEK-SP Maharatu Jaya dalam kategori baik.

4. Penerapan standar operasional prosedur

Pemberian SOP pada sebuah program memberikan jalur yang benar bagi anggota untuk melakukan tugas dan wewenangnya. Pengelola yang sukses adalah pengelola yang mampu menjalankan standar operasi yang telah dibuat sebelumnya. Penerapan SOP mewajibkan setiap individu untuk tanggung jawab terhadap tugasnya berupa disiplin dengan aturan yang telah dibuat. Standar operasi memuat hal-hal yang harus dan tidak harus dilakukan oleh pengelola dalam menjalankan tugasnya.

Konsep kerja dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur memberikan kemudahan dalam peningkatan profesionalitas pengelola dalam mencapai tujuan. Kinerja profesional memberikan dampak positif bagi keberlangsungan sebuah program. Penggunaan SOP sebagai standar kerja telah diterapkan oleh pengelola UEK-SP Kelurahan Maharatu ditandai dengan adanya kedisiplinan kerja pada masing-masing bagian. Dengan demikian penerapan Standar operasional Prosedur dinilai cukup baik walaupun masih terdapat banyak pelanggaran oleh oknum pengelola.

5. Dana Operasional

Dana operasional dalam mengelola sebuah program penting untuk diadakan, penggunaan dana operasional bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berkenaan dengan program misalnya dana untuk pembelian materai untuk mengesahkan surat perjanjian dan alat tulis kantor lainnya, berikut hasil wawancara mengenai dana operasional:

“untuk memenuhi tuntutan tanggungjawab perumusan penggunaan dana sebagai operasional telah diperhitungkan sebelumnya, tidak masalah bagi kami hanya terpenting kejelasan penggunaan dana tersebut”. (Wawancara dengan Kasir UEK-SP Maharatu Jaya, Hamidah Pulungan, 14 Desember 2012, 14.00)

Berdasarkan hasil wawancara di atas ketahu bahwa pemberian dana operasional kerja sangat bermanfaat dan membantu terlaksananya program dengan baik. Penggunaan dana operasional pengelola UEK-SP di Kelurahan Maharatu untuk kegiatan yang berkenaan dengan pencapaian tujuan program. Ketersediaan dana menjadi sangat penting, dengan adanya ketersediaan dana operasional diharapkan pengelola memberikan pelayanan yang maksimal dengan memberikan kemudahan dalam pemberian pinjaman. Adapun penggunaan dana operasional untuk pembelian peralatan dan perlengkapan kantor, dana operasional UEK-SP di Kelurahan Maharatu berasal dari laba yang diperoleh sebesar 10%.

Melihat besarnya jumlah dana operasional yang diberikan maka kemungkinan kurang maksimalnya pelayanan dengan alasan dana operasional yang kurang tidak akan terjadi.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang manajemen pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang dinilai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dapat ditarik kesimpulan dan hasil penelitian dinyatakan “Baik”. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pelaksanaan program UEK-SP di Kelurahan Maharatu adalah sumber daya manusia, lingkungan, sarana dan prasarana, penerapan SOP, dan dana operasional yang digunakan pengelola. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor sumber daya manusia menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap pengelolaan program UEK-SP. Sumber daya manusia merupakan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh pengelola dalam melaksanakan tugas, ketepatan penempatan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan beserta kecakapan pengelola dalam mencapai tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brantas, 2009, *Dasar-Dasar Manajemen*, Alfabeta, Bandung
- Cahyati, Eti, 2003, *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*, PT Grasindo, Jakarta.
- Manulang, M, 2001, *Dasar-Dasar Manajemen Gajah Mada Universitas Perss*, Yogyakarta
- Melayu S.P Hasibuan, 2003. *Manajemen dalam Pengertian dan Masalah*. Bumi Aksara. Jakarta
- S.U, Ibnu Syamsi, 1994, *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*, Rinime Cipta, Jakarta.
- Sugiono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Sujianto, 2008. *Implementasi Kebijakan Public ” Konsep Teori dan Praktek”*. Penerbit Alaf Riau. Pekanbaru.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metode penelitian sosial*. Bumi aksara : Jakarta.
- Widjaja. H.A.W, 2003. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- World Bank Institute, 2002. *Dasar-Dasar Analisis Kemiskinan*. Edisi Terjemahan. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Panduan Operasional Program Pemberdayaan Desa (PPD) Tahun 2005-2009 (BAPEMAS-BANGDES) Provinsi Riau.
- Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts/132/III/2005 tentang Kebijakan Program PPD.
- BPPM. 2009. *Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD)*. Tim Koordinasi Pembinaan Program Pembiayaan Desa Provinsi Riau. Riau.